

**PROBLEMATIKA PENGATURAN MINUMAN FERMENTASI
BERALKOHOL DALAM RANGKA Mendukung
KESEHATAN MASYARAKAT**

TESIS

Untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat Magister (S-2)
Program Studi Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan



diajukan oleh
Gama Mulya

NIM 24.C2.0002

kepada

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2026

ABSTRAK

Pengaturan minuman beralkohol di Indonesia masih dominan mengklasifikasikan produk berdasarkan kadar etanol (Golongan A, B, dan C) tanpa membedakan secara tegas proses produksi dan tingkat risikonya. Akibatnya, minuman fermentasi murni dengan manfaat kesehatan yang diproduksi terstandar kerap diperlakukan setara dengan minuman hasil destilasi maupun minuman campuran yang kurang memiliki manfaat kesehatan. Kondisi ini menjadi masalah karena sumber bahaya utama sering justru berasal dari produk tidak terstandar. Penyamarataan tersebut membuat pengendalian kurang tepat sasaran, kepastian hukum bagi pelaku usaha patuh melemah, dan perlindungan kesehatan masyarakat berpotensi tidak optimal.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan atas bahan hukum primer dan sekunder, diperkuat wawancara semi-terstruktur dengan ahli hukum kesehatan dan ahli teknologi pangan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan triangulasi untuk menilai konsistensi norma, bukti ilmiah kesehatan, serta pendapat ahli.

Hasil penelitian menunjukkan pengaturan minuman fermentasi beralkohol (MFB) tersebar lintas sektor (perindustrian, perdagangan, kesehatan/pangan, cukai, dan perizinan OSS-RBA) serta masih bertumpu pada kadar etanol, sehingga muncul ketidaksinkronan vertikal-horizontal dan beban perizinan berlapis. Kebijakan yang tidak membedakan proses produksi berdampak pada kesehatan masyarakat yaitu fokus pengawasan kurang mengarah pada sumber risiko utama yaitu campuran/ilegal yang tidak terstandar, sementara jalur legal dan pengawasan mutu bagi MFB terstandar dengan manfaat kesehatan menjadi tidak proporsional, hal ini berisiko mendorong pergeseran konsumsi ke pasar informal yang sulit diawasi. Urgensi peninjauan kebijakan terletak pada penerapan regulasi berbasis risiko yang menjadikan proses produksi sebagai dasar diferensiasi (fermentasi terstandar, fermentasi-destilasi, campuran), dibuat pengaturan tunggal lintas kementerian sehingga memberikan kepastian hukum disertai standar keamanan-mutu, pelabelan dan edukasi moderasi, serta penegakan terfokus pada segmen berisiko tinggi.

Kata kunci: minuman fermentasi beralkohol, hukum kesehatan, perizinan berbasis risiko, pangan fungsional

ABSTRACT

Regulation of alcoholic beverages in Indonesia still predominantly classifies products based on ethanol content (Class A, B, and C) without clearly distinguishing between the production process and risk levels. As a result, pure fermented beverages with health benefits produced according to standards are often treated on a par with distilled beverages or mixed beverages that offer less health benefits. This situation is problematic because the primary source of danger often comes from non-standardized products. This generalization results in inaccurate controls, weakens legal certainty for compliant businesses, and potentially suboptimal public health protection.

This research uses a normative juridical legal research method with a statutory and conceptual approach. Data were obtained through a literature review of primary and secondary legal materials, supported by semi-structured interviews with health law experts and food technology experts. Qualitative analysis was conducted using triangulation to assess the consistency of norms, scientific health evidence, and expert opinion. The research findings show that the regulation of fermented alcoholic beverages (MFB) is scattered across sectors (industry, trade, health/food, excise, and OSS-RBA licensing) and still relies on ethanol content, resulting in vertical-horizontal inconsistencies and multiple licensing burdens. Policies that do not differentiate production processes impact public health, with oversight not focusing on the primary source of risk, namely unstandardized mixtures/illegal beverages. Legal channels and quality control for standardized MFB with health benefits are disproportionate, risking a shift in consumption to informal markets that are difficult to monitor. The urgency of policy review lies in the implementation of risk-based regulations that make the production process the basis for differentiation (standardized fermentation, fermentation-distillation, and blending). A single, cross-ministerial regulation is needed to provide legal certainty, along with safety and quality standards, labeling and moderation education, and focused enforcement on high-risk segments.

Keywords: fermented alcoholic beverages, health law, risk-based licensing, functional food